

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Undang-undang pembentukkan Daerah

Kabupaten Tanah Laut dibentuk dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Berdasarkan peraturan tersebut Kabupaten Tanah Laut berkedudukan di Pelaihari dan terdiri dari 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Pelaihari, Jorong, Bati-Bati, Kurau dan Takisung.

Pada era desentralisasi dengan diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2000 berdasarkan UU Nomor 22 tahun 1999, diperbaharui dengan UU Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, maka beberapa peran pemerintah pusat dialihkan kepada pemerintah Daerah sebagai kewenangan wajib dan tugas pembantuan, salah satunya bidang pelayanan sosial.

Berdasarkan Peraturan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dalam Tahun Anggaran 2021 ini menyusun LKPJ/LPPD yang mana nomenklatur nya disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah laut Nomor 71 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 13 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah laut serta Tugas Pokok dan Fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanah laut.

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Sosial maka perlu Mengevaluasi tugas pokok tersebut dalam bentuk laporan pertanggungjawaban Dinas Kesehatan (LKPJ) dimana dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD.

b. Data Geografis Wilayah

Secara geografis, letak wilayah Kabupaten Tanah Laut yang beribukota Pelaihari berada di bagian selatan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan posisi $114^{\circ}30'20''$ - $115^{\circ}20'00''$ Bujur Timur dan $3^{\circ}30'33''$ - $4^{\circ}10'30''$ Lintang Selatan.

Kabupaten Tanah Laut memiliki luas wilayah daratan mencapai $3.631,35 \text{ km}^2$ (363.135 Ha) atau $9,17\%$ dari luas wilayah Kalsel. Luas tersebut belum termasuk luas zona perairan laut, sepanjang 3 mil dari garis pantai pada saat pasang tertinggi sepanjang 200 km. Bila luas daratan Kabupaten Tanah Laut ditambah dengan luas zona perairan lautnya, maka luas total luas wilayah menjadi 449.730 Ha atau $4.497,3 \text{ km}^2$. Adapun batas administrasi dapat diuraikan sebagai berikut :

Utara	: Kota Banjarbaru
Selatan	: Laut Jawa
Timur	: Kabupaten Tanah Bumbu
Barat	: Laut Jawa

Ditinjau dari segi topografinya, wilayah Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh dataran rendah yang landai, yang membentang dari Barat ke Timur, mulai dari arah Selatan (Pantai Laut Jawa) ke arah Utara (pedalaman), dan bergelombang hingga bergunung di daerah pedalaman yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar. Secara umum dapat dikatakan bahwa topografi wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat di bagi atas 2 (dua) bagian besar, yaitu:

1. Bagian selatan merupakan dataran rendah yang landai hingga berombak. Bentangan daerah ini memanjang dari Timur ke Barat dengan lebih melebar di bagian Barat yang terdiri dari rawa-rawa dan daerah aliran sungai, muara sungaidan Pantai Laut Jawa.
2. Bagian utara, merupakan daerah yang bergelombang, berbukit dan bergunung sampai ke perbatasan dengan Kabupaten Banjar. Pada wilayah ini terdapat beberapa puncak, yaitu:
 - Puncak gunung Kemuning (750 m dpl)
 - Puncak Gunung Batu Karo (621 m dpl)
 - Puncak Gunung Batu Balerang (921 m dpl)

- Puncak Gunung Kematian (951 m dpl)
- Puncak Gunung Batu Mandi (901 m dpl)
- Puncak Gunung Sekupang (1.051 m dpl)
- Puncak Gunung Haur Bonak (744 m dpl)
- Puncak Gunung Aur Bunek (1.150 m dpl)
- Puncak Gunung Condong (553 m dpl)

Dilihat dari sudut ketinggian tempat (elevasi), wilayah Kabupaten Tanah Laut dibagi 6 (enam) kelas elevasi , yaitu kelas 0 – 7 meter, 7 - 25 meter, 25 - 100 meter, 100 - 500 meter, 500 – 1000 meter dan diatas 1000 meter.

Kelas ketinggian (elevasi) lahan yang paling luas di Kabupaten Tanah Laut adalah kelas elevasi 0 - 7 meter dpl, yaitu mencapai 58.240 Ha (15.6 % dari luas daratan). Sedangkan kelas ketinggian yang paling kecil luasnya adalah kelas elevasi diatas 1.000 meter dpl, yaitu 13.661 Ha (3,7% dari luas daratan). Kelas elevasi ketinggian 0-7 meter dpl terdapat di seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Tambang Ulang sedangkan kelas elevasi ketinggian di atas 500 meter terdapat di Kecamatan Kintap, Jorong, Pelaihari dan Bati-Bati.

Kemudian kemiringan/kelerengan suatu lahan berkaitan dengan kepekaan tanah terhadap erosi tanah, semakin tinggi/terjal lerengnya semakin peka tanah terhadap erosi. Bila dilihat dari kemiringan tanahnya, wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat dibedakan dalam 6 (enam) kelompok, yaitu sebagai berikut :

1. 0 – 3 %, sebagian besar tersebar di wilayah Timur membentang dari bagian Barat hingga Timur, mulai dari Selatan (pantai) ke Utara (pedalaman) dengan luas 250.460 Ha (67,16 % dari luas total daratan)
2. 3 – 8 %, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 44.830 Ha (12,02 % dari luas total daratan).
3. 8 – 15 %, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 31.600 Ha (8,47 % dari luas total daratan)

4. 15 – 25 %, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 21.805 Ha (5,85 % dari luas total daratan)
5. 25 – 40 %, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah dan Utara, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 10.690 Ha (2,87 % dari luas total daratan)
6. 40 %, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah dan Utara, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 13.545 Ha (3,63 % dari luas total daratan)

Wilayah Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh kelas lereng 0 – 3% yaitu sebesar 67,16% dari luas total wilayah daratan. Kelas lereng tersebut selain potensial untuk tanaman pangan lahan basah (padi sawah) berpotensi juga untuk perikanan tambak bagi wilayah yang ada di sepanjang pantai.

Berdasarkan tinjauan terhadap peta geologi Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Tanah Laut berumur antara mesozoik, tersier dan kuartar. Secara fisiografis Kabupaten Tanah Laut terletak di bagian ujung Barat Daya Pegunungan Meratus dan dibagian Selatan Cekungan Barito dan Anak Cekungan Asam-Asam. Pegunungan Meratus terutama ditempati oleh batuan pratersier, sedangkan Cekungan Barito dan Anak Cekungan Asam-Asam ditempati oleh batuan sediment tersier.

Morfologi wilayah di Kabupaten Tanah Laut dapat dibagi menjadi 4 (empat) satuan morfologi yaitu satuan morfologi dataran, dataran bergelombang, perbukitan dan pegunungan. Satuan morfologi dataran menempati bagian ujung Selatan dan ujung Barat. Ketinggian berkisar antara 0 – 10 m dpl. Satuan ini berupa endapan alluvium rawa dan pantai yang tersusun dari batuan sediment kwarter. Satuan Morfologi Dataran Bergelombang menempati bagian barat dan selatan, yaitu sekitar jalur jalan raya Bati-bati, Pelaihari, Asam-asam, Pelaihari - Batakan dan Pelaihari – Takisung.

Ketinggian berkisar antara 10 – 50 m dpl. Satuan ini tersusun oleh batuan sediment kwarter dan tersier. Satuan Morfologi Perbukitan menempati bagian tengah merupakan kaki dari Pegunungan Meratus. Ketinggian berkisar antara 50 – 250 m dpl. Satuan ini tersusun oleh batuan metamorf dan sediment

serta sebagian kecil batuan beku. Satuan Morfologi Pegunungan menempati bagian Utara, dicirikan oleh lereng yang terjal dengan ketinggian puncak lebih dari 250 m dpl. Beberapa puncaknya seperti Gunung Kematian (951 m dpl), Gunung Batu Belerang (921 m dpl), Gunung Batu Karo (621 m dpl).

Jenis Tanah yang ada di Wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah jenis tanah podsolik, latosol, alluvial dan gleisol. Yang mendominasi wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah jenis tanah Alluvial, Podsolik dan Laotosol. Sedangkan jenis tanah Gleisol hanya sebagian kecil saja, dan tersebar di 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Kurau, Bati-Bati, Takisung, Tambang Ulang, Pelaihari dan Panyipatan.

1. Jenis tanah latosol memiliki solum tanah tebal sampai sangat tebal, kandungan bahan organik 3 – 9 %, pH tanah antara 4,5 – 6,5 yaitu dari masam sampai agak masam, struktur tanahnya lemah dan konsistennya gembur. Secara keseluruhannya ini mempunyai sifat fisika dan sifat kimia yang baik, sehingga produktivitas lahannya sedang sampai tinggi, menempati areal seluas 108.780 Ha (29,17 % dari luas daratan seluruhnya).
2. Jenis tanah Alluvial disebut juga sebagai tubuh tanah endapan, kandungan bahan organiknya rendah, reaksi tanahnya masam sampai netral, struktur tanahnya pejal atau tanpa struktur dan konsistensinya keras waktu kering, teguh waktu lembab, kandungan unsure haranya relative kaya dan banyak tergantung pada bahan induknya. Secara keseluruhan tanah alluvial mempunyai sifat fisika kurang baik sampai sedang, sifat kimia sedang sampai baik, sehingga produktivitas tanahnya sedang sampai tinggi, menempati areal seluas 120.290 Ha (32,26 % dari luas lautan).
3. Jenis tanah podsolik memiliki solum tanah yang paling tebal yaitu 90 – 180 cm, tekstur tanahnya lempung berliat hingga liat, konsistensinya gembur di bagian atas dan teguh di lapisan bawah, kandungan bahan organiknya kurang dari 5 %, kandungan unsur hara tanaman rendah, reaksi tanah (pH) sangat masam sampai sangat masam yaitu 4 – 5,5. Secara keseluruhan tanah ini memiliki sifat kimia kurang baik, sifat fisika tidak mantap karena sifat agregatnya kurang baik, sehingga mudah terkena erosi. Produktivitasnya adalah rendah sampai sedang, menempati

areal satuan 123.010 Ha (32,98% dari total daratan).

Wilayah Kabupaten Tanah Laut memiliki Tekstur tanah dengan klasifikasi yaitu tekstur halus.

Tekstur tanah akan berpengaruh terhadap kesuburan fisik tanah, kemampuan menyerap dan menyimpan air dan kepekaan terhadap erosi.

Umumnya tanah di Kabupaten Tanah Laut bertekstur sedang yang meliputi jenis tanah alluvial, latosol dan podsolik yaitu 297.285 Ha (79,91 % dari luas total daratan), tanah bertekstur halus meliputi jenis tanah gleisol dan podsonik seluas 46.750Ha (12.54 % dari luas total daratan) dan tanah yang bertekstur kasar meliputi jenis tanah alluvial seluas 28.915 Ha (7.75 % dari luas total daratan). Dengan demikian, di Kabupaten Tanah laut sedikitnya terdapat 28.915 Ha (7.75% dari luas total daratan) mempunyai kendala dalam pengembangan kawasan budidaya dengan faktor pembatastekstur tanah yang kasar.

Kedalaman efektif tanah di wilayah Kabupaten Tanah Laut di klasifikasikan kedalam 4 (empat) kelas kedalaman efektif tanah yaitu dalam (lebih dari 90 cm) sedang(80–90 cm), dangkal (30–60 cm) dan sangat dangkal (kurang dari 30 cm). Kedalaman efektif tanah akan berpengaruh terhadap wilayah perakaran tanaman, jenis tanaman/tumbuhan dan tegakan tanaman.

Kabupaten Tanah Laut termasuk daerah beriklim tropis basah karena tidak terdapat perbedaan musim yang jelas. Hujan turun merata sepanjang tahun dengan bulan-bulan relatif basah antara Bulan Desember – Februari dan bulan-bulan relatif kering antara bulan Juni – Agustus. Berdasarkan hasil penelitian antara 1915 – 1941, curah hujan bagian Timur/pantai sebesar 2,324 mm/tahun dengan rata-rata hari hujan 150 hari/tahun dan di bagian Barat sampai dengan perbatasan kabupaten. Curah hujan berkisar antara 2.500 – 3.000 mm/tahun dan di wilayah Timur berkisar antara 2.000 – 2.500 mm/tahun.

Data curah hujan rata-rata bulanan dan perhitungan evapotranspilasi bulanan menyebabkan Kabupaten Tanah laut setiap bulannya tidak mengalami kekurangan air. Tanaman tahunan tidak memerlukan adanya air

irigasi pada bulan-bulan yang *water balance* nya kurang dari 100 mm akan mengalami kekurangan air.

Di Kabupaten Tanah Laut keadaan hidrologi atau sumber daya air dapat dikelompokkan atas 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Sungai atau Danau : Keadaan hidrologi sungai dan danau sebagai sumber dayaair permukaan di Kabupaten Tanah Laut atas sungai-sungai besar dan kecil yang bermuara di Laut Jawa. Sungai-sungai besar antara lain Sungai Maluka (640 Km²), Sungai Tabanio (770 Km²), Sungai Sabuhur (190 Km²), Sungai Swarangan (580 Km²). Fungsi-fungsi sungai tersebut adalah untuk sumber air minum, pengairan, usaha perikanan dan sebagai sarana transportasi antara Daerah timur dengan daerah barat.
2. Air Tanah : Kedalaman air tanah di suatu wilayah antara lain ditentukan oleh tinggi wilayah dari permukaan laut, jenis batuan induk dan sebagainya. WilayahKabupaten Tanah Laut tersusun dari batuan induk yang bervariasi dan terletakpaa ketinggian 0–1000 m dpl. Oleh sebab itu kedalaman air tanahnya kan bervariasi, dari dangkal (daerah pantai hingga perbukitan dan pegunungan).

c. Jumlah penduduk

Dilihat dari aspeknya penduduk mempunyai hubungan timbal balik dengan pembangunan. Penduduk Kabupaten Tanah Laut berperan sebagai subyek dan obyek dari pembangunan itu sendiri. Sebagai subyek pembangunan, maka penduduk dibina dan dikembangkan agar mampu menjadi penggerak pembangunan. Sebaliknya sebagaiobyek pembangunan, penduduk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dan menerima segala konsekuensi dari pelaksanaan pembangunan tersebut.

Adapun jumlah Penduduk Tanah Laut Semester II Tahun 2021 (data hasil integrasi dengan pemerintah pusat adalah 348.226 jiwa yang terdiri dari 177.580 laki-laki dan 170.646 perempuan dan masih tampak bahwa penyebaran Penduduk masih bertumpu di Kecamatan Pelaihari dengan jumlah penduduk 77.933 jiwa kemudian diikuti Kecamatan Bati-bati 44.123 jiwa dan Kecamatan Kintap 42.638 Sedangkan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Bumi Makmur dengan jumlah penduduk 13.825 jiwa.

Tabel 1.1 Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sebaran Pendudukper Kecamatan Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin		
		Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	Takisung	16.443	16.001	32.444
2	Jorong	17.356	16.395	33.751
3	Pelaihari	39.463	38.470	77.933
4	Kurau	7.043	6.870	13.913
5	Bati Bati	22.487	21.636	44.123
6	Panyipatan	12.571	12.379	24.950
7	Kintap	21.978	20.660	42.638
8	Tambang Ulang	9.217	8.863	18.080
9	Batu Ampar	14.031	13.244	27.275
10	Bajuin	9.938	9.356	19.294
11	Bumi Makmur	7.053	6.772	13.825
Jumlah		177.580	170.646	348.226

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Pada saat ini Kabupaten Tanah Laut terbagi dalam 11 (sebelas) kecamatan, 130 (seratus tiga puluh) desa dan 5 (lima) kelurahan. Dalam tabel 1.2 berikut ini di sampaikan secara terperinci jumlah kecamatan beserta desa/kelurahan dan luas wilayahnya

Tabel 1.2 Daftar Nama Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut Beserta Jumlah Desa/Kelurahan Dan Luas Wilayah

No	Kecamatan	Ibu Kota	Jumlah Kelurahan/Desa	Luas wilayah (km ²)	Persentase Luas Kecamatan dengan Luas Kabupaten
1	Panyipatan	Panyipatan	10	336,00	9,25
2	Takisung	Gunung Makmur	12	343,00	9,45
3	Kurau	Padang Luas	11	127,00	3,50
4	Bumi Makmur	Handil Babirik	11	141,00	3,88
5	Bati-Bati	Padang	14	234,75	6,46

6	Tambang Ulang	Tambang Ulang	9	160,75	4,43
7	Pelaihari	Pelaihari	20	379,45	10,45
8	Bajuin	Bajuin	9	196,30	5,41
9	Batu Ampar	Batu Ampar	14	548,10	15,09
10	Jorong	Jorong	11	628,00	17,29
11	Kintap	Kintapura	14	537,00	14,79
Jumlah			135	3.631,35	100

Sumber : Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka 2021 (Badan Pusat Statistik)

e. Gambaran Umum Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, dalam pelaksanaan tugas pembangunan, baik pelayanan kepada masyarakat melalui Pembinaan, Penyuluhan dan Pendampingan pada hakekatnya berpedoman pada hukum dan kebijakan yang sejalan dengan hakekat Otonomi itu sendiri yaitu khususnya memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang Kesejahteraan Sosial, yang berpedoman kepada kebijakan Pemerintah pusat dan daerah.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial pada dasarnya merupakan bagian dari pembangunan nasional dengan sasaran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang merupakan keluarga miskin yang harus ditangani secara profesional dan sungguh-sungguh. Adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial berdampak pada masalah- masalah lain seperti masalah pendidikan, kesehatan, agama, ekonomi dan masalah lainnya.

Agar Pembangunan Kesejahteraan Sosial segera dapat mengentaskan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, dengan adanya dukungan dan peran serta masyarakat untuk mau ikut memecahkan masalah ini, sehingga nantinya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dapat menempuh kehidupan yang layak, berkemampuan, bermartabat sebagai manusia layaknya.

f. Struktur Organisasi

Dinas Sosial Kabupaten Tanah laut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah laut Nomor 71 Tahun 2016 dipimpin oleh seorang kepala Dinas Sosial yang dibantu oleh :

1. Sekretariat
2. 2 (dua) Kepala Bidang yaitu :

- a. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial
- b. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir miskin

Adapun tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

Sekretariat

Meliputi penyusunan perencanaan program/kegiatan, pelaporan kinerja, administrasi keuangan dan asset, administrasi umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu 2 (dua) sub Bagian meliputi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Bertugas memberikan pelayanan administratif urusan umum dan urusan kepegawaian.
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Bertugas memberikan pelayanan administratif dalam menyiapkan bahan penyusunan, evaluasi program dan kegiatan serta pelaporan.

Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial

Meliputi rehabilitasi sosial terhadap penyandang cacat dan eks trauma, anak terlantar, lanjut usia, penanganan orang terlantar, pemulangan eks narapidana, penyalahgunaan Napza, perlindungan sosial anak, korban bencana, akses jaminan sosial, dan penunjang Program Keluarga Harapan serta anak berhadapan dengan hukum. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sosial melalui Sekretaris Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) seksi antara lain :

- a. Seksi Rehabilitasi Sosial
- b. Seksi Jaminan Sosial Keluarga
- c. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

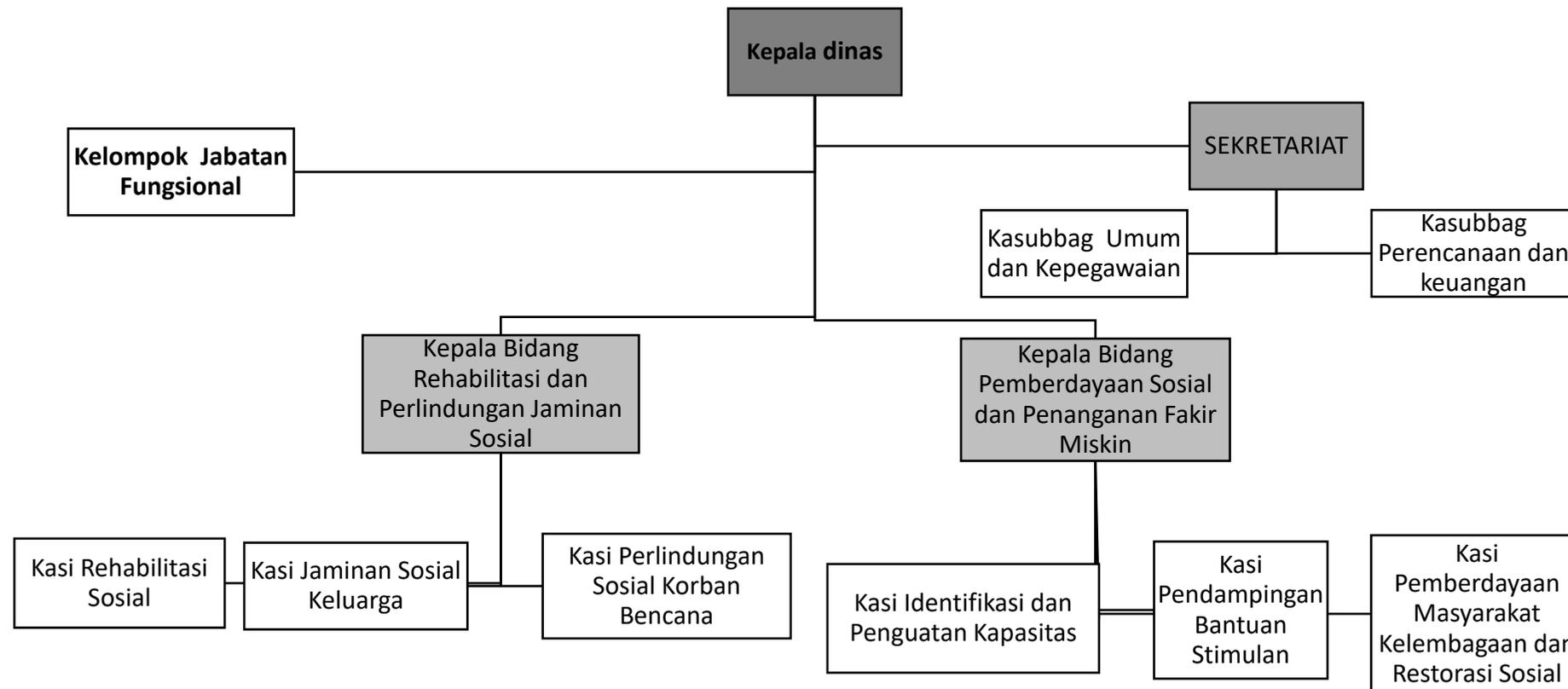
Meliputi pemberdayaan keluarga miskin, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial, kelembagaan dan organisasi sosial, pemberdayaan PSM, TKSK, dan verifikasi dan validasi basis data terpadu.

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) sub seksi yaitu :

- a. Seksi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;
- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan & Restorasi sosial;
- c. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada Gambar (dibawah ini) :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT**



g. Kepegawaian

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagai Organisasi perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dalam mencapai target kinerja selama 5 (lima) tahun. Jumlah ASN yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut saat ini sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang PNS dan 16 (enam belas) PTT. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran tentang Data dan Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

Tabel
Jumlah pegawai menurut status, pangkat dan golongan

NO	Status Kepegawaian	Gol/ Ruang	Kadis		Sekretariat	Bid. Pemb Sos & Pengn FakMis	Bid. Rehab & Prindngn Jam.Sos	Jumlah
1	P N S		28					
	Pembina Utama Muda	(IV/c)	1		-	-	-	1
-	Pembina Tk.I	(IV/b)	-		1	-	1	2
	Pembina	(IV/a)	-		-	3	1	4
	Penata Tingkat I	III/d	-		2	1	-	3
	Penata	III/c	-		-	2	2	4
	Penata Muda Tk.I	III/b	-		-	2	-	2
	Penata Muda	III/a			1	1	1	3
	Pengatur Tk.I	II/d	-		3	-	1	4
	Pengatur	II/c	-		-	2	-	2
	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-		1	-	-	1
	Pengatur Muda	II/a	-		-	-	-	-
	Juru Tingkat I	I/d	-		2	-	-	2
	Juru	I/c	-		-	-	-	-
	Juru Muda Tk I	I/b	-		-	-	-	-
	Juru Muda	I/a	-		-	-	-	-
2	Honorar Daerah	-	-		-	-	-	-
3	PTT/Sukwan/Kontrak	PTT	-		16	-	-	16

Komposisi Pegawai Dinas Sosial berdasarkan Pendidikan
Tabel 2
Pegawai menurut Status dan Tingkat Pendidikan

NO	Status Kepegawaian	JUMLAH
1	PNS	
	Strata 2	5
	Strata 1	12
	Diploma III/IV	-
	SMA/Sederajat	9
	SMP/Sederajat	-
	SD/Sederajat	2
	TOTAL	28
2	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	
	Strata 1	3
	Diploma III/IV	2
	SMA/Sederajat	7
	SMP/Sederajat	1
	SD/Sederajat	3
	TOTAL	16

h. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kerja sebagai “perangkat keras” suatu organisasi, merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang terhadap kelancaran pelaksanaan tugas suatu organisasi.

Pada tahun 2021 untuk sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan Dinas Sosial dapat dikatakan masih kurang dalam hal sarana operasional yakni Mobil untuk operasional Pelayanan Kegiatan Dinas Sosial. Adapun rekapitulasi sarana dan prasarana Dinas Sosial dapat dilihat pada (Lampiran) :

i. Realisasi Anggaran Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dengan prinsip sebagai berikut :

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah .

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi (2020)
Belanja Operasi	Rp. 19.743.333.841	Rp. 13.585.822.292	68,81	Rp. 5.672.524.759
Belanja Pegawai	Rp. 5.531.320.158	Rp. 3.551.518.627	64,21	Rp. 3.162.935.779
Belanja Barang	Rp. 3.526.175.304	Rp. 2.586.698.665	73,36	Rp. 1.750.555.730
Belanja Bantuan Sosial	Rp. 10.373.600.000	Rp. 7.170.290.000	69,12	Rp. 565.433.250
Belanja Modal				Rp. 193.600.000
Belanja Tanah	0,00	0,00		Rp. 119.300.000
Belanja Peralatan dan mesin	Rp. 312.238.379	Rp. 277.315.000	88,82	Rp. 60.800.000
Belanja bangunan dan gedung	0,00	0,00		Rp. 13.500.000
Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00		0,00

Sumber : LRA sampai dengan Desember 2021 Dinas Sosial

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut

- Data PMKS yang masih belum valid
- Sarana dan Prasarana dan SDM yang menangani PMKS masih belum mendukung.
- Program Penanganan PMKS masih belum optimal.
- Sistem pelayanan yang masih belum terencana dengan baik, belum terpadu dan masih belum berkesinambungan.
- Adanya permasalahan sosial yang bersifat insidental sehingga harus segera ditangani.
- Masih rendahnya partisipasi sosial masyarakat dalam penanganan kesejahteraan sosial
- Peran dunia usaha masih relatif rendah dalam turut serta penanganan masalah kesejahteraan sosial.

b. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan jangka Menengah

Setiap pembangunan, baik pembangunan nasional maupun daerah bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun tidak semua pembangunan berdampak positif bagi masyarakat oleh karena itu pembangunan bukan hanya sekedar membangun fisik dan infrastruktur tapi pembangunan manusia seutuhnya harus menjadi perhatian yang serius sehingga masyarakat dapat merasakan makna dari pembangunan serta dapat menjaga kelestarian dari sebuah kemajuan untuk kehidupan yang lebih baik.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan pembangunan dan modernisasi dapat memicu berbagai permasalahan sosial. Kualitas dan kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial cenderung meningkat. Angka kemiskinan relatif masih tinggi di tengah kemajuan dan era globalisasi, hal ini disebabkan berbagai faktor baik kapasitas masyarakat maupun ketidaksiapan dalam menghadapi kemajuan dan modernisasi. Meningkatnya kualitas kesehatan yang tidak dibarengi dengan meningkatnya kualitas ekonomi masyarakat itupun berdampak pada keterlantaran lanjut usia dan penyandang disabilitas. Hal ini tentunya harus diantisipasi dengan terencana dan berkesinambungan.

Persentase Penyandang Masalah Dalam rangka mengantisipasi permasalahan saat ini dan kedepan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut harus mampu mengembangkan inovasi agar pelayanan dan penanganan masalah yang dihadapi masyarakat dapat ditangani dengan lebih cepat, tepat dan manfaat.

1. Dinas Sosial merupakan SKPD yang melaksanakan Sasaran pada Misi ke 5 yaitu **“Membangun Sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”**, *Sasaran RPJMD : Meningkatnya perlindungan masyarakat*, dengan indikator :Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi Mandiri
2. Ketersediaan Basis Data Terpadu PMKS dan Kemiskinan (%)
3. Persentase PMKS yang tertangani
4. Persentase PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi lainnya.

Dengan demikian sasaran RPJMD yang menjadi core bussines Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam RPJMD dapat diuraikan pada pada tabel berikut :

Sasaran RPJMD, Target dan Capaian Tahun 2021

No.	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	
1	2	3	
1	<i>Meningkatnya perlindungan masyarakat</i>	1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi Mandiri
		2	Ketersediaan Basis Data Terpadu PMKS dan Kemiskinan (%)
		3	Persentase PMKS yang tertangani
		4	Persentase PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi lainnya.

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Jenis Pelayanan dasar untuk standar pelayanan Minimal Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut mengacu pada Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor

Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut yaitu :

- (a) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti ;
- (b) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti ;
- (c) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti ;
- (d) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti ; dan
- (e) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

No	Pelayanan Dasar	Indikator
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Presentase Penyandang Disabilitas Dasar Luar Panti yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar.
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Presentase Anak Terlantar Luar Panti yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar.
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Presentase Lanjut Usia Terlantar Luar Panti yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar.
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Presentase Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti yang memperoleh Pelayanan Rehabilitasi sosial dasar
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.	Presentase korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.

**INDIKATOR DAN NILAI SPM SERTA BATAS WAKTU PENCAPAIAN SPM
SECARA NASIONAL**

No	Pelayanan Dasar	Indikator	%
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Presentase Penyandang Disabilitas Dasar Luar Panti yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar.	40
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Presentase Anak Terlantar Luar Panti yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar.	80
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Presentase Lanjut Usia Terlantar Luar Panti yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar.	40
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Presentase Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti yang memperoleh Pelayanan Rehabilitasi sosial dasar	40
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.	Presentase korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.	80

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang tertangani	100%	87,02%	87,02%
		Persentase PMKS yang menjadi Mandiri	10 %	56,32%	563,2%

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
6	Sosial	62	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ----- ----- x 100 % Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	$\frac{3122}{15690} \times 100$	19,89 %	1. Jumlah penyandang disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 368 orang 2. Jumlah Lansia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 2754 orang 3. Populasi penyandang disabilitas dan lansia terlantar = 15.690 orang
		63	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran ----- ----- x 100	$\frac{53.198}{53.252} \times 100$	99,90%	1. Jumlah korban bencana alam dan sosial = 53.198 jiwa

			saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	% Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten			2. Populasi korban bencana alam dan sosial di Kabupaten Tanah Laut = 53.252 jiwa
		64	Rasio rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar dengan Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar ----- ----- x100% Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng	$\frac{1}{25} \times 100$	4%	1. Jumlah rumah singgah atau rumah perlindungan sosial yang dimiliki = 1 unit 2. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gepeng = 25 orang
		65	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	$\frac{89}{89} \times 100$	100%	1. Jumlah anak terlantar yang

			usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	----- ----- x 100 % Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng seharusnya dapat di reunifikasi dengan keluarga			<p>direunifikasi = 17 orang</p> <p>2. Jumlah gepeng yang direunifikasi = 72 orang</p> <p>3. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng seharusnya dapat di reunifikasi dengan keluarga = 89 orang</p>
		66	Rasio pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	Jumlah pekerja sosial profesional dan atau Tenaga Kerja Sosial dan atau relawan sosial yang ada ----- ----- x 100 % Jumlah penyandang disabilitas	$\frac{180}{3122} \times 100$	5,76 %	<p>1. Jumlah PSM = 116 orang</p> <p>2. Jumlah TKSK = 11 orang</p> <p>3. Jumlah pengelola Puskesmas = 33 orang</p>

				terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dibina			4. TAGANA = 20 orang 5. Jumlah penyandang disabilitas yang dibina = 368 orang 6. Jumlah Lansia terlantar yang dibina = 2754 orang
--	--	--	--	---	--	--	---

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	INDIKATOR	SUMBER DATA	KET
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	2341	SLRT	
		2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	15.690	DTKS	
		3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1	Dinsos	
		4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	3122	Dinsos	

		5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1	Dinsos	B 1
		6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	3122	Dinsos	
		7	Jumlah rumah singgah/ shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1	Dinsos	
		8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	0	Dinsos	
		9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	0		
		10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	0		
		11	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	0		
		12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0		
		13	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0		
		14	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	0		

		15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	111 orang	Dinsos	
		16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	0		
		17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	2341	SLRT	
		18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	25	Dinsos	
		19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	89	Dinsos	
		20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	25	Dinsos	
		21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk			

2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota daerah	1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	4845	Dinsos	
		2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	4845	Dinsos	
		3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	2	Dinsos	
		4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan			
		5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	4845	Dinsos	
		6	Jumlah pekerja sosial professional/ tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	40	Dinsos	

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No IKK	Data yang diperlukan	Capaian	Keterangan Sumber Data
40	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandang pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	3122	1. Jumlah penyandang disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 368 orang 2. Jumlah Lansia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 2754 orang
	Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	15690	3. Populasi penyandang disabilitas dan lansia terlantar = 15.690 orang
41	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	53198	Jumlah korban bencana alam dan sosial = 53.198 jiwa
	populasi korban bencana alam dan sosial yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota	53252	Populasi korban bencana alam dan sosial di Kabupaten Tanah Laut = 53.252 jiwa

2.3 AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2021 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2021. Selain itu realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja Tahun 2021.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah Program, Kegiatan, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana program, kegiatan, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. Pengukuran kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.

No.	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	2	3		4	5	6
1	<i>Meningkatnya perlindungan masyarakat</i>	1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi Mandiri	20 %	56,32 %	281,6 %
		2	Ketersediaan Basis Data Terpadu PMKS dan Kemiskinan (%)	100 %	102,97 %	102,97 %
		3	Persentase PMKS yang tertangani	100 %	87,02%	87,02%
		4	Persentase PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi lainnya.	100 %	100 %	100 %

2.3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Indikator kinerja utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan strategis. Penetapan IKU dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. IKU Dinas Sosial berjumlah 1 (satu) indikator. IKU ini digunakan untuk mengukur keberhasilan Tujuan strategis yang merupakan Tugas dan Fungsi Bidang Sosial.

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran RPJMD)		Indikator Kinerja Utama	Tahun 2020			Tahun 2021			SKPD Penanggung Jawab
				Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi	
1	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat	1	Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)							
		2	Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)	15	6,98	43,67	20	56,32	281,6 %	Dinas Sosial

Rumus :

% PMKS yang menjadi
mandiri =

$$\frac{\text{PMKS Mandiri}}{\text{PMKS yang ditangani}} \times 100 \%$$

$$\frac{53.515}{95.005} \times 100 \%$$

56,32%

Pembangunan Kesejahteraan sosial merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan secara keseluruhan bagi masyarakat di Kabupaten Tanah Lau. **Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)** menjadi salah satu sasaran strategis dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial tersebut. Menurut Permensos nomor : 8 tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial terdapat 26 jenis PMKS yang menjadi sasaran pembangunan kesejahteraan sosial, berikut adalah tabel rakapitulasi data PMKS di Kabupaten Tanah Laut tahun 2021.

Rekapitulasi Data PMKS
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

NO.	PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	KAB. TALA
1	Anak Balita Terlantar	0
2	Anak Terlantar	24
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	36
4	Anak Jalanan	-
5	Anak dengan kedisabilitas (ADK)	-
6	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan Salah	-
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	-
8	Lanjut Usia Terlantar	12.646
9	Penyandang Disabilitas	3044
10	Tuna Susila	-
11	Gelandangan	-
12	Pengemis	-
13	Pemulung	-
14	Kelompok Minoritas	-

15	Bekas Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWLP)	124
16	orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	-
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	-
18	Korban Traffiking	-
19	Korban Tindak Kekerasan	-
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	-
21	Korban Bencana Alam	48.252
22	Korban Bencana Sosial	4922
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	-
24	Fakir Miskin (FM)	40.100
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	25
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-
	TOTAL	109.173

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa ada peningkatan angka PMKS dari 45.090 jiwa pada tahun 2020 menjadi 109.173 jiwa pada tahun 2021 atau meningkat sekitar 242,12 %. Meningkatnya angka PMKS di Kabupaten Tanah Laut sangat dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Terjadinya bencana alam banjir pada awal tahun 2021 yang melanda hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan termasuk di Kabupaten Tanah Laut yang mengakibatkan meningkatnya warga terdampak bencana alam banjir.
2. Dampak pandemic covid-19 yang mengakibatkan roda perekonomian masyarakat menjadi terhambat, daya beli menurun dan aktifitas masyarakatpun tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini mengakibatkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan apabila tidak segera ditangani maka tidak menutup kemungkinan akan meningkatkan angka kemiskinan.

Dengan meningkatnya angka warga terdampak bencana dan warga terdampak covid-19 maka angka PMKS di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 telah meningkat secara signifikan. Namun demikian penanganan terhadap PMKS pada tahun 2021 telah dilaksanakan secara optimal, dari 109.173 PMKS telah ditangani sekitar 95.005 jiwa atau sekitar 87,02%, artinya terdapat sekitar 14.168 PMKS yang belum tertangani secara optimal. Dari 26 jenis PMKS tersebut di atas hanya sekitar 8 (delapan) jenis PMKS yang terdata dan menjadi sasaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut yaitu :

**Jumlah PMKS yang dapat ditangani Dinas Sosial
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021**

No.	Jenis PMKS	Jumlah
1	Anak Balita Terlantar	0
2	Anak Terlantar	20
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	12
4	Lanjut Usia Terlantar	2.754
5	Penyandang Disabilitas	460
6	Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP)	47
7	Korban Penyalahgunaan NAPZA	0
8	Korban Bencana Alam	48.252
9	Korban Bencana Sosial	4877
10	Fakir Miskin	38.583
TOTAL		95.005

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat 95.005 PMKS yang telah ditangani yang terdiri dari 8 (delapan) jenis PMKS yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Dari 8 jenis PMKS yang paling banyak mendapat penanganan adalah Korban

Bencana Alam yaitu sebesar 48.252 jiwa atau sekitar 50,79 % dan penanganan Fakir Miskin yaitu sebanyak 38.583 jiwa atau sekitar 40,61 %. Program penanganan fakir miskin ini masih lebih banyak diarahkan pada warga terdampak covid-19 sehingga program-program baik dari pusat seperti PKH, BPNT, dan BST. Sedangkan dari APBD Kabupaten Tanah Laut melaksanakan program BLT APBD dan Program Pemenuhan kebutuhan dasar berupa bantuan sosial terencana.

Untuk mengukur PMKS yang menjadi mandiri setelah mendapat penanganan, terlebih dahulu ditetapkan indikator PMKS Mandiri yaitu sebagai berikut :

1. Dapat mengakses rumah sehat artinya setiap PMKS memiliki dan/atau menempati rumah sehat atau rumah yang layak huni
2. Dapat mengakses pangan 3 x sehari, artinya setiap PMKS dapat terpenuhi kebutuhan dasar pangannya untuk memenuhi makan sebanyak 3 x sehari.
3. Berpenghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimalnya, artinya PMKS memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal yang meliputi permakanaan, pakaian, pendidikan dan kesehatanya.
4. Memiliki akses bagi anak usia sekolah artinya PMKS dapat menyekolahkan anak-anaknya
5. Memiliki akses kesehatan dasar, artinya PMKS memiliki jaminan kesehatan dan dapat mengakses lembaga penyelenggara layanan kesehatan.

Berdasarkan indikator tersebut, maka dapat dihitung dan ditetapkan PMKS yang menjadi mandiri setelah mendapat penanganan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Korban bencana alam sebanyak 48.252 orang
2. Bencana Sosial sebanyak 4877 orang
3. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan sebanyak 47 orang
4. Keluarga Penerima Program PKH sebanyak 339 orang

Jumlah seluruh PMKS yang menjadi Mandiri adalah sebanyak

Jumlah 53.515 Jiwa.

BAB III
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

- 1. Tugas Pembantuan Yang Diterima Dari Pemerintah / Pemerintah Provinsi (SKPD Dinas Sosial tidak menyelenggarakan kegiatan dimaksud).**
- 2. Tugas Pembantuan Yang Diberikan (SKPD Dinas Sosial Tidak Menyelenggarakan Kegiatan Dimaksud).**

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Bidang Sosial

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan dasar untuk standar pelayanan Minimal Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut yaitu :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti ;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti ;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti ;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti ; dan
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

No	Pelayanan Dasar	Indikator
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Presentase Penyandang Disabilitas Dasar Luar Panti yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar.
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Presentase Anak Terlantar Luar Panti yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar.
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Presentase Lanjut Usia Terlantar Luar Panti yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar.
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Presentase Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti yang memperoleh Pelayanan Rehabilitasi sosial dasar

5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.	Presentase korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.
---	---	--

4.1.2 Target dan Realisasi Pencapaian SPM oleh Daerah

No	Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Presentase Penyandang Disabilitas Dasar Luar Panti yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar.	100%	$\frac{368}{368} \times 100\%$ =100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Presentase Anak Terlantar Luar Panti yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar.	100%	$\frac{10}{10} \times 100\%$ = 100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Presentase Lanjut Usia Terlantar Luar Panti yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar.	100%	$\frac{2754}{2754} \times 100\%$ =100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Presentase Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti yang memperoleh	100%	$\frac{5}{5} \times 100\%$ =100%

	pengemis di luar panti	Pelayanan Rehabilitasi sosial dasar		
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.	Presentase korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.	100%	$\frac{53.198}{53.252} \times 100$ $= 99,90\%$

Analisis realisasi SPM Dinas Sosial dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 09 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang menjadi ketetapan Standar Pelayanan minimal adalah
 - a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
 - b. Rehabilitasi sosial dasar Anak terlantar di luar panti
 - c. Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia terlantar di luar panti
 - d. Rehabilitasi sosial dasar Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
 - e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban bencana Daerah Kabupaten/ Kota.
2. Data Penyandang disabilitas di Kabupaten Tanah Laut relatif tinggi yaitu mencapai angka 3044 Pada Tahun 2021 Dinas Sosial Kabupaten Tanah laut menetapkan untuk memeberikan pelayanan Rrehabilitasi Sosial dasar berupa pemenuhan kebutuhan dasar dan pelatihan keterampilan kepada 368 orang penyandang Disabilitas. Rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar di Kabupaten Tanah laut pada tahun 2021 telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 368 orang (100 %).
3. Rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar di luar panti yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, telah dilaksanakan terhadap 10 anak terlantar. Jenis pelayanan dasar yang diberikan adalah berupa berupa penjangkauan dan layanan rujukan. 10 anak terlantar tersebut telah mampu

mengakses layanan pendidikan dan keterampilan serta mendapat jaminan kesehatan yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut..

4. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di Kabupaten Tanah Laut terlaksana bagi 2754 orang. Bentuk pelayanan lanjut usia terlantar yang diberikan adalah berupa pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usi yang potensial dan pemberian jaminan kesehatan yang ditanggung oleh Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di Kabupaten Tanah Laut telah dilaksanakan terhadap 5 orang gelandangan dan pengemis. Pengemis yang ada di Kabupaten Tanah Laut masih bersifat musiman yaitu pada hari-hari tertentu saja, kebanyakan mereka adalah pendatang atau bukan penduduk Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan untuk gelandangan telah diberikan layanan rujukan kepanti tuna sosial di Banjarbaru.
6. Kabupaten Tanah Laut termasuk wilayah rawan bencana baik bencana alam yaitu banjir, angin puting beliung, abrasi maupun bencana sosial (kebakaran). Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana selalu dilaksanakan sesuai dengan jumlah korban yang terdampak, pencapaian program pada tahun 2021 jumlah warga terdampak bencana sebanyak 53.252 jiwa dan yang telah mendapat perlindungan dan jaminan sosial sebanyak 53.198 jiwa atau mencapai 99,90%.

4.1.3 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Bidang Sosial 2021 adalah sebagai berikut :

No	Pelayanan Dasar	Indikator	Alokasi Dana	Sumber Dana
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas	Presentase Penyandang Disabilitas Dasar Luar Panti yang Memperoleh	Rp. 4.080.539.510	APBD

	terlantar di luar panti	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar.		
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Presentase Anak Terlantar Luar Panti yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar.	Rp. 92.329.000	APBD
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Presentase Lanjut Usia Terlantar Luar Panti yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar.	Rp. 4.080.539.510	APBD
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Presentase Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti yang memperoleh Pelayanan Rehabilitasi sosial dasar	Rp. 252.254.710	APBD
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.	Presentase korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada	Rp. 701.584.930	APBD

4.1.4 Dukungan Personil

No	Pelayanan Dasar	Indikator	Dukungan Personil
1	Rehabilitasi sosial daar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Presentase Penyandang Disabilitas Dasar Luar Panti yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar.	36 (3 Orang PNS, 11 TKSK dan 22 PSM)
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Presentase Anak Terlantar Luar Panti yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar.	6 (2 Orang PNS dan 4 Orang Non PNS)
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Presentase Lanjut Usia Terlantar Luar Panti yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar.	36 (3 Orang PNS, 11 TKSK dan 22 PSM)
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Presentase Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti yang memperoleh Pelayanan Rehabilitasi sosial dasar	6 (2 Orang PNS dan 4 Orang Non PNS)
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.	Presentase korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.	23 (3 orang PNS, 20 TAGANA)

4.1.5 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- a. Belum sempurnanya Database Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

- b. Belum adanya peraturan bupati tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang sosial
- c. Kurangnya Sumberdaya Aparatur (SDM) yang melaksanakan kegiatan-kegiatan penanganan PMKS terutama yang memiliki kualitas (sarjana kesejahteraan sosial)

Solusi :

- a. Membuat aplikasi database Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Tanah Laut.
- b. Menyusun rancangan peraturan bupati tentang Standar Operasional Prosedur (SOP)
- c. Mengusulkan tenaga tambahan yang mempunyai keahlian sosial (sarjana Kessos)
- d. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi dan Instansi terkait untuk menunjang kegiatan Rehabilitasi Sosial dalam rangka pelaksanaan SPM di Kabupaten Tanah Laut.